

**Pontianak, BERKAT.**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pertanahan Negara provinsi itu akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyelesaian aset tanah yang menjadi salah satu kendala diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar. "Kita akan ada MoU dengan BPN dalam hal mengurus sertifikat tanah dalam penyelesaian aset," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kalbar, Lumano, di Pontianak, Jumat (6/7).

Dikatakannya, mengurus sertifikat tanah tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. Aset tanah yang belum bersertifikasi ini, lanjut Lumano, menjadi salah satu kendala dari Pemprov Kalbar dalam meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar.

"Kita akan tetap mengusahakan agar WTP dan pimpinan SKPD sudah kita panggil untuk mengintensifkan itu," kata Lumano.

Aset tanah yang belum bersertifikat senilai Rp53 miliar lebih ini menjadi temuan BPK yang harus segera di-

## Pemprov Kalbar-BPN akan MoU Terkait Penyelesaian Aset

selesaikan.

Selain tanah, juga ada aset tetap jalan dan jaringan irigasi senilai Rp380 miliar yang juga belum ditatakelolakan dengan sistem pembukuan yang benar.

Lumano mengatakan, permasalahan aset tetap jalan dan jaringan irigasi ini sudah lama dan pencatatannya hilang karena kantor Dinas Pekerjaan Umum pernah terbakar. "Datanya yang harus kita cari. Itu saja," kata pengganti Bachtiar ini.

Ditambahkan Lumano, Pemprov Kalbar akan memberitahu kepada BPK RI Perwakilan Kalbar mengenai masalah ini dan meminta rekomendasi dari BPK.

BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun anggaran 2011.

Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil, jika permasalahan aset bisa selesai, opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bisa dicapai.

"Sayang seribu sayang, persoalan aset ini sangat mengganggu dan opini WTP belum dapat direalisasikan," katanya.

Rizal Djalil mengatakan, persoalan aset pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih menjadi yang paling menonjol.

Ia mengatakan, masih banyak persoalan aset yang belum diselesaikan, diantaranya aset tetap, jalan dan jaringan irigasi senilai Rp380 miliar yang belum ditatakelolakan dengan sistem pembukuan yang benar. Selain itu, ada aset tanah senilai Rp92,9 miliar yang belum selesai penatalaksanaannya, aset tetap peralatan mesin senilai Rp2,8 miliar. Kemudian ada aset tanah yang belum bersertifikat senilai Rp53 miliar lebih.

"Kami minta Sekda dan semua jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait penyelesaian aset, termasuk

Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk segera membuat action plan, memperbaiki tata laksanaannya," katanya.

Rizal Djalil juga meminta agar Pemerintah Daerah untuk tidak memperlambat penyelesaian aset.

Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, merasa sangat kesal, karena permasalahan aset ini tidak terlalu sulit, tinggal mencatat saja.

Menurut Cornelis, apa yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar harus segera ditindaklanjuti. "Ini merupakan sinyal perintah kerja. Sudah jelas, tinggal kita laksanakan saja," tegasnya.

Ia juga akan mengevaluasi SKPD yang tidak menyelesaikan perintah dari BPK tersebut.

"Mau tidak mau lah, karena ini ada batas waktunya," kesal orang nomor satu, di Kalbar ini. (nia)